

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMANGAN  
PARIWISATA PESISIR BARAT  
( Tesis )

Oleh  
YUSNILI



Pogram Pasca Sarjana Magister Ilmu Administrasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas lampung  
Bandar Lampung  
2016

# **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA**

## **PESISIR BARAT**

**YUSNILI**

**MAHASISWA MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

**UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2016**

### **ABSTRAK**

Potensi alam yang dimiliki Kabupaten Pesisir Barat menghantarkan pemerintah provinsi Lampung untuk mengembangkan potensi pariwisata untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan kelembagaan pada Sektor Pariwisata di Indonesia sedang dikembangkan dan didayagunakan untuk memperbesar devisa negara, memperluas lapangan pekerjaan, pemeratakan kesempatan berusaha. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Pengembangan pariwisata dan untuk menemukan faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan. Metode yang digunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Pesisir Barat sudah cukup baik hal ini dilihat dari segi komunikasi telah dilakukan koordinasi antar lembaga (Pemerintah, masyarakat, pelaku usaha), pemasaran dilakukan oleh PHRI, ASSITA, HPI, dan promosi telah dilakukan secara bersama, dari segi sumberdaya masih diperlukan penambahan pegawai dan perlu diadakan pelatihan sertifikasi profesi pariwisata, sikap pelaksana memiliki sikap dan etos kerja yang mendukung kebijakan pariwisata, serta struktur organisasi sudah cukup baik. dan dari segi ketercapaian target dan sasaran dilihat dari anggaran yang mencapai 90%, Kendalanya masih kurangnya SDM pariwisata, Tenaga kerja Industri pariwisata yang belum memiliki sertifikasi kompetensi, anggaran yang minim. Saran untuk pemerintah Pesisir Barat: perlu pelatihan profesi, perlu diadakan pelatihan sertifikasi kompetensi, sarana dan prasarana lebih ditingkatkan dengan penambahan anggaran.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Pengembangan Pariwisata, Pembangunan kelembagaan pariwisata.

**THE IMPLEMENTATION POLICY OF TOURISM DEVELOPMENT OF  
PESISIR BARAT**

**YUSNILI**

**COLLAGE MAGISTER KNOWLADGE ADMINISTRATION OF PUBLIC  
LAMPUNG UNIVERCITY 2016**

**ABSTRACT**

Regency has their own natural potential of the Pesisir Barat. delivers Lampung province to develop the tourism potential to boost economic growth. Institutional development in the tourism sector in Indonesia is being developed and utilized to increase the national income, expand employment opportunities, equalize work opportunity. The purpose of research is to analyze the implementation of tourism development policy and to discover the factors that hinder implementasu policy. The method used descriptive kualitatif. Technic data collection using observation, interviews and documentation. The study concluded that the implementation of Policy of Tourism Development of the Pesisir Barat is good enough it is seen in terms of communication has made coordination among institutions (government, society, business), the marketing is done by the IHRA, ASSITA, and HPI, and the sale has been carried out jointly, in terms of resources still needed additional staff and training should be a tourism professional certification, executive attitudes has the attitude and work ethic that support tourism policy, as well as the organizational structure is already quite good. and in terms of achievement of goals and targets viewed from budget reached 90%, obstacles still lack of tourism human resources, tourism industry workforce who do not have the certification of competence, the government budget is less. Suggestions for Pesisir Barat: need additional staff, should be a competency certification training, facilities and infrastructure is further enhanced with the addition of the budget.

**Keywords:** Implementation Policy, Tourism Development, Institutional development of tourism

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMANGAN  
PARIWISATA PESISIR BARAT  
( Tesis )**

Oleh

**YUSNILI**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
**MAGISTER ILMU ADMINISTRASI**

Pada

Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Administrasi  
Universitas Lampung



Pogram Pasca Sarjana Magister Ilmu Administrasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas lampung  
Bandar Lampung  
2016

**Judul Tesis** : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN  
PENGEMBANGAN PARIWISATA  
PESISIR BARAT**

**Nama Mahasiswa** : **Yusnili**

**No. Pokok Mahasiswa** : 1426061015

**Program Studi** : Magister Ilmu Administrasi

**Fakultas** : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**1. Komisi Pembimbing**

**Dr. Nur Effendi, S.Sos., M.Si.**  
NIP 19691012 199512 1 001

**Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si.**  
NIP 19710122 199512 2 001

**MENGETAHUI**

**2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Lampung**

**Dr. Bambang Utoyo S., M.Si.**  
NIP 19630206 198803 1 002

## MENGESAHKAN

### I. Tim Penguji

**Ketua : Dr. Nur Effendi, S.Sos., M.Si.**



.....

**Penguji Utama : Dr. Novita Tresiana, S.Sos., M.Si.**



.....

**Sekretaris : Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si.**



.....

### 2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**Drs. H. Agus Hadiawan, M.Si.**  
NIP. 19580109 198603 1 002

### 3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



**Prof. Dr. Sudjarwo, M.S.**  
NIP. 19520528 198103 1 002

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 26 September 2016

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis dengan judul “ Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Pesisir Barat “ adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagatisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, September 2016

Yang membuat Pernyataan



NPM. 1426061015

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Yusnili, di lahirkan di Tanggamus pada tanggal 02 April 1972. Merupakan anak pertama dari 7 bersaudara, pasangan dari Bapak H. Muhammad Yusuf dan Ibu Hj.Sariah dan Istri dari Syamsuddin Hamid,SE. Ibu dari Falahuddin Hamid, Yumna Khairunnisa, Nurul astika. Adapun pendidikan yang pernah penulis selesaikan selama ini dimulai dari :

SD Muhammadiyah Pangkul (Lulus Tahun 1985), meneruskan pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri I Wonosobo Tanggamus (Lulus Tahun 1988) dan SMA Muhammadiyah I Pringsewu (Lulus Tahun 1991).

Pada tahun 1993 Penulis melanjutkan ke Universitas Bandar Lampung fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Administrasi Negara lulus tahun (1997) dan selanjutnya penulis kembali meneruskan pendidikan pascasarjana pada program studi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNILA.



## **PERSEMBAHAN**

### **BISMILLAHIRROHMANIRROHIM**

Tesis ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku ayah dan emak terimakasih tak terhinga telah membesarkanku dan memberi ilmu serta doa yang tak terputus.
2. Suami tercinta terimakasih atas doa dan dukungannya
3. Anak-anakku ( Falahuddin Hamid, Yumna Khairunnisa, Nurul Atika ) yang menjadi penyemangat ibu mudah- mudahan anak-anakku pendidikannya akan lebih tinggi dari ibu
4. Adik-adikku tersayang

## MOTTO

“ Masalah adalah sesuatu yang tiada habisnya hadir dalam kehidupan manusia dan hanya orang-orang yang uletlah yang akan mampu mengatasinya ”

“ Waktu yang sulit tidak akan pernah bertahan selama lamanya, tetapi orang yang tangguh akan bertahan lama ”

“ Dalam kehidupan, seringkali kenyataan hidup yang pahitlah yang membuat orang punya impian yang indah, tetapi sesudahnya, kita harus memfokuskan pikiran, perhatian dan energi pada impian indah tersebut ,bukan pada kenyataan hidup yang keras, agar impian itu segera menjadi kenyataan ”

SUCCSES NEEDS A PROCESS SO THINK AS BIG AS GALAXY

( Penulis )

## SANWACANA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran ALLOH SWT,karena atas berkat rahmad dan ridho-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “ Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Pesiisr Barat “. Penulisan Tesis ini disusun untuk memnuhi persyaratan pada penyusunan Tesis di program Pasca Magister Ilmu Administrai Publik Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Dalam penulisan tesis ini, penulis memperoleh banyak bantuan dari berbagai pihak,karennn itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hasriadi Mat Akin, M.P. selaku Rektor Unila
2. Bapak Prof. Dr. Sudjarwo, M.S. selaku Direktur Program Pasca Sarjana Unila
3. Bapak Drs.Hi.Agus Hadiawan,M.Si, selaku Dekan fisip Unila
4. Bapak Dr,Bambang Utoyo,M.Si Selaku ketua Program Study Magister ilmu Administrai Fisip Unila
5. Bapak Drs.Dian Komarsyah,M.Si Selaku sekretaris program Study Magister ilmu Administrai Fisip Unila
6. Ibu Dr,Novita Tresiana,S.sos.M.Si , selaku Dosen pembahas terimakasih atas saran dan masukannya sehingga tesis ini lebih baik dari sebelumnya.
7. Bapak Dr.Nur Effendi,S.sos,M.Si selaku dosen pembimbing I Tesis terimakasih atas perhatian,bimbingan dan motivasinya selama proses penyelesaian tesis.

8. Ibu Rahayu Sulistiowati,S.Sos,M.Si . selaku dosen pembimbing II Tesis terimakasih atas perhatian,bimbingan dan motivasinya selama proses penyelesaian tesis
9. Seluruh jajaran dosen dan pegawai administrasi serta semua civitas akademi FISIP Universitas Lampung.
10. Bapak Audi Marpi,MM beserta jajarannya Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pesisir Barat yang telah bersedia memberikan informasi,keterangan, dan data-data yang penulis perlukan dalam penyelesaian tesis ini.
11. Teman-teman Magister Ilmu administrasi FISIP UNILA angkatan ke dua tahun 2014 semoga silaturahmi tetap terjalin.
12. Keluarga besar yang telah memberikan support dalam penyelesaian penelitian.

Sangat disadari dalam tesis ini terdapat banyak kekurangan oleh karena itu semua saran dan kritik penulis terima dengan senang hati demi kesempurnaan penulisan tesis ini.Akhirnya harapan penulis semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua.Amin Yarobbalalamin.

Bandar Lampung Agustus 2016

Penulis

YUSNILI

## DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK .....	I
PERSEMBAHAN .....	VII
SANWANCAR .....	IX
DAFTAR ISI .....	XI
DAFTAR GAMBAR .....	XIII
DAFTAR TABEL .....	XIV
DAFTAR LAMPIRAN .....	XV
I. PENDAHULUAN .....	1
I.I. Latar Belakang.....	1
I.2. Identifikasi Masalah.....	11
1.3. Pembatasan Masalah .....	12
1.4. Tujuan .....	12
1.5. Manfaat dan Kegunaan Penelitian .....	13
II. TINJAUAN PUSTAKA .....	14
2.1. Penelitian Sebelumnya .....	14
2.2. Pengertian Kebijakan Publik.....	15
2.3. Tahap-tahap Kebijakan Publik .....	18
2.4. Implementasi Kebijakan.....	22
2.5. Pariwisata .....	30

2.6. Jenis-jenis Wisata.....	37
2.7. Kawasan dan Obyek Wisata .....	38
2.8. Konsumsi wisatawan.....	40
2.9. Investasi .....	43
2.10. Industri pariwisata.....	44
2.11. Kerangka pemikiran.....	45
2.12. Hipotesis.....	47
III. METODE PENELITIAN.....	48
3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	48
3.2. Lokasi Penelitian.....	49
3.3. Fokus Penelitian.....	49
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	51
3.5. Teknik Pengumpulan data.....	52
3.6. Teknik Analisis Data.....	52
3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan data.....	55
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .....	58
4.1. Gambaran Umum Lokasi penelitian .....	58
4.1.1. Sejarah kabupaten Pesisir Barat .....	58
4.1.2. Kondisi Geografis .....	59
4.1.3. Objek dan Daya Tarik Wisata.....	60
4.1.4. Gambaran Pelayanan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.....	62
4.2. Hasil dan Pembahasan.....	66
4.2.1. Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata .....	71
4.2.2. Komunikasi .....	75
4.2.3. Sumber Daya.....	82
4.2.4. Disposisi.....	95

4.2.5. Struktur Organisasi .....	104
4.2.7. Kendala dalam Implementasi .....	110
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	121
5.1. Kesimpulan .....	121
5.2. Saran.....	124

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Data kunjungan Wisatawan ke Provinsi Lampung .....	3
Tabel 2. Jumlah Tamu yang berkunjung ke Provinsi Lampung .....	3
Tabel 3. Rata-rata menginap tamu .....	4
Tabel 4. Sebaran Potensi Wisata Bahari Kabupaten Pesisir Barat.....	62
Tabel 5. Sebaran potensi Wisata Religi dan Budaya .....	64
Tabel 6. Tebaran Potensi Ekowisata pesisir Barat .....	64
Tabel 7. Personil Dinas pariwisata dan Ekonomi Kreatif .....	81
Tabel 8. Data pegawai berdasarkan pendidikan.....	82
Tabel 9. Sarana dan Prasarana .....	83
Tabel 10, Hotel/losmen/koteg .....	84
Tabel 11. Biro perjalanan pariwisata .....	86
Tabel 12. Rumah makan .....	87
Tabel 13. Usaha cendramata .....	89



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Izin untuk melakukan Riset di Dinas pariwisata dan ekonomi Kreatif Pesisir barat
2. Pedoman Wawancara penelitian
3. Tabel Triangulasi data penelitian
4. Lembar Observasi Penelitian
5. Data kelompok Sadar wisata Kabupaten Pesisir Barat
6. Daftar peserta pelatihan penjaga pantai
7. Daftar pokdarwis
8. Data pelatihan Pengrajin tapis
9. Rengstra program kegiatan,dan pendanaan indikatif Dinas pariwisata dan ekonomi Kreatif Pesisir Barat
10. Surat Pernyataan
11. Kumpulan foto Dokumentasi penelitian

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan dan pengembangan pariwisata di daerah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ) menempatkan Undang-Undang Republik Indonesia ( UU RI ) Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Undang undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai satu pijakan. Undang-Undang Kepariwisata disusun dengan beberapa pertimbangan yang menarik yaitu : (a) Disadari bahwa Indonesia memiliki sumberdaya pariwisata yang melimpah, (b) berwisata merupakan hak asasi manusia, (c) Kepariwisata merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, (d) Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha. Selanjutnya dalam klausul pertimbangan disebutkan bahwa penetapan Undang-Undang Pemerintah Daerah ditujukan untuk : (a) mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing (b) meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah daerah.

Kunjungan wisatawan mempunyai dampak ekonomi kepada daerah tujuan wisata yang didatangi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung adalah dengan adanya kunjungan wisatawan, maka akan menciptakan permintaan terhadap fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan jasa industri pariwisata seperti : hotel, rumah makan, sarana angkutan / travel biro dan jenis hiburan lainnya, yang pada akhirnya mampu mengurangi pengangguran dan peningkatan pendapatan masyarakat. Target kunjungan wisata secara nasional pada tahun 2015 s.d tahun 2019 berjumlah 20 juta kunjungan wisman dan 275 juta kunjungan wisatawan nusantara dengan realisasi devisa negara sebanyak 240 Trilyun dan 13 juta tenaga kerja yang terserap pada sektor pariwisata, sedangkan Provinsi Lampung menargetkan jumlah kunjungan wisatawan nusantara sebanyak 7 juta dan wisatawan mancanegara sebanyak 150 ribu orang pada periode yang sama.

Sesuai dengan amanat undang-undang RI Nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam pasal 5 menyebutkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sedangkan pada pasal 7 menyebutkan bahwa pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota wajib untuk menyusun dokumen perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang sangat terkait satu sama lain. Dokumen tersebut dimulai dari Rencana strategis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RSWP-3-K), Rencana Zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP-3-K), Rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RPWP-3-K), dan Rencana Aksi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RAPWP-3-K).

Pantai Barat berada pada Koridor 1 atau Jalur Barat pengembangan pariwisata Provinsi Lampung termasuk Kawasan Wisata Unggulan (KWU) Provinsi Lampung yaitu KWU Krui-Tanjung Setia. KWU ini juga menjadisuat Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN). Penetapan 7 KWU tersebut menyebabkan pertumbuhan jumlah wisatawan yang datang ke Provinsi Lampung meningkat setiap tahunnya. Berikut disajikan jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Provinsi Lampung.

**Tabel 1**  
**Data Kunjungan Wisatawan ke Provinsi Lampung**

TAHUN	WISATAWAN		TOTAL
	NUSANTARA	MANCANEGARA	
2010	100,198	2,104	102,929
2011	168,252	5,003	170,356
2012	172,691	14,833	187,524
2013	144,506	13,060	157,566
2014	167,974	15,181	183,155

Sumber : Buku Pariwisata dalam Angka Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2015.

**Tabel 2**  
**JUMLAH TAMU YANG BERKUNJUNG KE PROVINSI LAMPUNG  
PADA HOTEL NON BINTANG 2009-2014**

TAHUN	WISATAWAN		TOTAL
	NUSANTARA	MANCANEGARA	
2010	292,982	123	293,105
2011	366,502	534	367,036
2012	389,844	525	390,369
2013	666,454	4,325	670,779
2014	767,089	4,757	771,846

Sumber : Buku Pariwisata dalam Angka Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2015.

**Tabel 3**  
**RATA-RATA LAMA MENGINAP TAMU MANCANEGERA DAN**  
**NUSANTARA DI PROVINSI LAMPUNG 2010-2014**

BULAN	Hotel Berbintang					Hotel Melati				
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
Januari	2.02	1.93	1.49	1.68	1.78	1.13	1.47	1.40	1.34	1.44
Februari	1.69	1.79	1.66	1.86	1.75	1.02	1.41	1.33	1.37	1.39
Maret	2.17	1.77	1.53	2.43	2.67	1.01	1.37	1.25	1.39	1.42
April	1.78	1.60	1.67	1.58	1.67	1.03	1.37	1.29	1.38	1.43
Mei	1.72	1.76	1.73	1.42	1.95	1.01	1.38	1.28	1.36	1.42
Juni	1.42	1.89	1.62	1.48	1.37	1.00	1.33	1.25	1.40	1.45
Juli	1.69	1.78	1.51	1.56	1.28	1.01	1.31	1.37	1.60	1.80
Agustus	1.89	1.69	1.82	1.57	1.39	1.02	1.37	1.38	1.57	1.59
September	1.64	1.59	1.58	1.56	1.89	1.01	1.31	1.39	1.55	1.58
Oktober	1.68	1.51	2.05	1.48	1.93	1.01	1.29	1.37	1.60	1.90
November	1.56	1.47	1.60	1.45	1.75	1.01	1.32	1.32	1.53	1.60
Desember	1.60	1.60	1.64			1.02	1.30	1.27		
<b>Jumlah</b>	1.74	1.70	1.66	1.51	1.62	1.02	1.35	1.33	1.34	1.42

Sumber : Buku Pariwisata dalam Angka Dinas pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2015.

Kabupaten Pesisir Barat merupakan sebuah kabupaten termuda di Provinsi Lampung. Pesisir Barat hasil pemekaran Kabupaten Lampung Barat, yang disyahkan pada tanggal 25 Oktober 2012, yang memiliki kondisi geografis berupa wilayah Pesisir pada bagian barat Provinsi Lampung. Letaknya yang menghadap langsung Samudra Hindia memiliki kondisi yang curam dan tipe pasang surut campuran dengan dominasi pasang surut ganda. Iklim di perairan Pantai Barat dipengaruhi oleh Samudera Hindia yang dicirikan oleh adanya angin muson dan curah hujan yang tinggi. Pantai Barat mempunyai gelombang yang paling besar didaerah Lampung, dan gelombang paling besar dapat terjadi di musim Barat (November-Maret).

Segenap potensi alam yang dimiliki oleh Kabupaten Pesisir Barat menghantar Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengembangkan potensi pariwisata di wilayah Kabupaten Pesisir Barat, yang juga menjadi salah satu ikon dan daya tarik yang diharapkan mampu memicu dan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung secara keseluruhan dan Kabupaten Pesisir Barat pada khususnya. Sektor pariwisata di Indonesia dewasa ini sedang dikembangkan dan didayagunakan untuk memperbesar devisa negara, memperluas lapangan pekerjaan dan pemerataan kesempatan berusaha terutama bagi masyarakat setempat. Disamping itu, industri pariwisata juga berperan dalam mendorong pembangunan daerah serta memperkenalkan alam dan budaya daerah yang sangat khas dan menarik. Oleh karena itu pembangunan industri pariwisata tidak hanya diarahkan untuk pembangunan ekonomi saja tetapi juga untuk melestarikan budaya dan alam.

Untuk mendukung potensi kepariwisataan tersebut maka diperlukan suatu perencanaan dibidang kepariwisataan yang memuat program kepariwisataan yang dapat mengoptimalkan potensi pariwisata tersebut. Berlakunya Undang Undang Otonomi Daerah merupakan titik tolak yang sangat strategis untuk menggali, mengembangkan dan mengelola aset aset dan sumberdaya yang dimiliki sehingga dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan pembangunan dan perekonomian

Kebijakan merupakan salah satu bahasan yang paling banyak dibicarakan, baik dikalangan akademisi perguruan tinggi, praktisi, maupun masyarakat luas. Masing-masing memiliki persepsi yang berbeda. Kaum akademisi mengkaji

kebijakan publik sebagai produk politik, produk hukum, bahkan sebagai media untuk memecahkan berbagai masalah. Kalangan Praktisi memandang kebijakan publik sebagai rangkaian peraturan perundang undangan yang menjadi acuan dalam bertindak. Dan masyarakat umum mengindentikkan kebijakan publik dengan keberpihakan pemerintah terhadap suatu isu.

Dalam pengembangan pariwisata Pesisir Barat Pemerintah Pesisir Barat memiliki Kebijakan dan strategi sebagai berikut :

#### 1. Kebijakan dan strategi pembangunan destinasi pariwisata

Destinasi pariwisata atau yang disebut juga dengan daerah tujuan Pariwisata, adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, prasarana umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, investasi serta pemberdayaan masyarakat yang paling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Pembangunan destinasi pariwisata yang berkualitas, berkelanjutan dan berbasis masyarakat menjadi penting dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan untuk memenuhi harapan serta ekspektasi wisatawan yang berkunjung ke kabupaten Pesisir Barat, karena itu arah kebijakan dan strategi pembangunan destinasi pariwisata kabupaten Pesisir Barat meliputi kebijakan dan strategi sebagai berikut

- a. Perwilayahan Destinasi Pariwisata
- b. Pembangunan daya tarik wisata
- c. Pembangunan prasarana umum dan fasilitas pariwisata
- d. Pembangunan aksesibilitas dan / atau transportasi
- e. Pemberdayaan masyarakat
- f. Pengembangan Investasi

## 2. Kebijakan dan strategi pembangunan pemasaran pariwisata

Pembangunan pemasaran pariwisata adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.

- a. Pengembangan Pasar wisatawan
- b. Pengembangan citra pariwisata
- c. Pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata

## 3. Kebijakan dan Strategi Pembangunan Industri Pariwisata

Pembangunan Industri pariwisata adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur industri pariwisata, peningkatan devisa, produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggungjawab terhadap lingkungan.

Pembangunan industri pariwisata meliputi :

- a. Penguatan struktur industri pariwisata
- b. Peningkatan daya saing produk pariwisata
- c. Pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata
- d. Penciptaan kredibilitas bisnis
- e. Pengembangan tanggungjawab terhadap lingkungan.

## 4. Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelembagaan

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan organisasi kepariwisataan, pengembangan sumberdaya manusia pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas



pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan di destinasi pariwisata. Pembangunan kelembagaan kepariwisataan meliputi :

- a. Penguatan organisasi kepariwisataan
- b. Pembangunan sumberdaya manusia pariwisata

Pembangunan kelembagaan pariwisata menyangkut tiga stakeholders pariwisata yaitu pemerintah, pranata kemasyarakatan lokal dan pelaku pariwisata (Damanik dan Weber, 2006:21-24). Menurut Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisata Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif Tahun 2012 halaman 44-45 model pengelolaan destinasi pariwisata ada beberapa macam seperti gambar di bawah ini.



Sumber: Pengembangan wisata bahari di Indonesia Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisata Badan Pengembangan SDP Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kreatif tahun 2012

Model 1 unsur pengelola utama adalah pranata kemasyarakatan lokal, sedangkan pemerintah dan pelaku utama sebagai mitra. Model ini disebut Pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism*). Model 2 unsur pengelola utama adalah pelaku pariwisata, sedangkan masyarakat dan pemerintah sebagai mitra. Model 3 unsur pelaku utama pariwisata adalah pemerintah. Model ini biasanya partisipasi masyarakat terbatas. Model yang terakhir adalah model yang harus dilaksanakan sehingga terciptanya pariwisata yang berkelanjutan (*sustainable tourism*) dapat terwujud. Model ini digambarkan bahwa semua lembaga pariwisata bersifat profesional didalam mengelola kepariwisataan.

Pentingnya masalah kelembagaan ini, maka peneliti memfokuskan kepada implementasi kebijakan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Pesisir Barat. Untuk menjelaskan kebijakan tersebut, peneliti menggunakan model implementasi kebijakan dari Edwards III. Model implementasi kebijakan ini dipakai karena pengembangan pariwisata Pesisir Barat mempunyai karakteristik *top down*. Indikator model ini bisa menjelaskan secara komprehensif tentang kinerja implementasi.

Dalam proses implementasi kebijakan pengembangan pariwisata Pesisir Barat tentu saja tidak luput dari masalah. Berdasarkan analisis dalam latar belakang diatas model implementasi yang dekat untuk meneliti masalah ini adalah model yang dikemukakan oleh Edwards III, maka peneliti membahas permasalahan sebagai penelitian tesis dengan judul “ **Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Pesisir Barat** ”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Keragaman kondisi alam dan budaya mempunyai implikasi tersendiri dalam pengembangan pariwisata Kabupaten Pesisir Barat. Sebagai sebuah produk pariwisata keragaman tersebut menawarkan potensi bagi wisatawan untuk mendapatkan pengalaman wisata yang berharga. Nilai tumbuh dari keragaman produk berpeluang untuk meraih pasar wisatawan yang lebih luas dan beragam. Bila dikembangkan dengan benar, keragaman produk juga berpotensi untuk meningkatkan pengeluaran biaya berwisata dan jumlah kunjungan wisatawan.

Keberhasilan produk dalam menggerakkan pariwisata akan menghasilkan berbagai dampak dan efek positif yang diharapkan menjawab berbagai isu strategis pembangunan Provinsi Lampung umumnya, dan Kabupaten Pesisir Barat pada khususnya. Dalam pengembangan pariwisata tingkat provinsi, harus diarahkan secara kolektif untuk mendukung pencapaian visi misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Pesisir Barat. Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalahnya dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi kebijakan pengembangan pariwisata Kabupaten Pesisir Barat?
2. Faktor apakah yang menghambat Implementasi Kebijakan pengembangan pariwisata Kabupaten Pesisir Barat?

## **1.3 Pembatasan Masalah**

Penelitian ini dibatasi pada implementasi kebijakan dan strategi pembangunan kelembagaan pariwisata Kabupaten Pesisir Barat yang meliputi

1. Penguatan Organisasi Kepariwisata
2. Pembangunan Sumber Daya Pariwisata

#### **1.4 Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis Implementasi kebijakan pengembangan pariwisata Kabupaten pesisir Barat.
2. Untuk menemukan faktor-faktor yang menghambat Implementasi kebijakan pengembangan pariwisata Kabupaten Pesisir Barat.

#### **1.5 Manfaat dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Secara Teoritis**

Secara Teoritis dapat memberi sumbangan pemikiran bagi kemajuan ilmu pengetahuan di bidang kajian kebijakan publik khususnya studi kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat dan dapat memberi saran dan masukan kepada Pemda Kabupaten Pesisir Barat dalam mengambil kebijakan pengembangan sektor pariwisata.

##### **2. Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi masyarakat Kabupaten Pesisir Barat dalam mengembangkan usaha pariwisata, selain itu sebagai bahan masukan bagi pihak pemerintah daerah dalam penentuan perumusan kebijakan di sektor Pariwisata. Semoga penelitian ini dapat menambah khasanah keilmuan dalam bidang pariwisata dan bermanfaat bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang pariwisata.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Penelitian Sebelumnya**

Beberapa penelitian sebelumnya yang fokus pada strategi pengembangan pariwisata dan implementasi kebijakan pengembangan pariwisata sebagai berikut :

1. Pada Jurnal Kepariwisata Volume 6, No.3, September 2011 Josef AGD meneliti tentang strategi pengembangan potensi wisata bahari di Kabupaten Ende mempunyai kesimpulan yaitu pemda harus mempunyai kebijakan yang memudahkan investor dalam berusaha, pemerintah membuat perencanaan untuk mengembangkan kawasan-kawasan wisata bahari sehingga dapat diketahui kawasan mana yang lebih dapat cepat dijual dan kawasan mana yang perlu lebih banyak memerlukan penataan inprasruktur, meningkatkan sarana-sarana pendukung kawasan wisata bahari menyiapkan sumber daya manusia yang akan pengelolaan wisata bahari, Pemerintah mempromosikan kawasan-kawasan wisata bahari di Kabupaten Ende secara kontinue dan berkesinambungan melalui berbagai cara dan media.
2. Implementasi kebijakan Pengelolaan wilayah pesisir terpadu di kabupaten Lombok Barat oleh Arum Padmarani Swarna Aurajati Universitas

Diponegoro tahun 2011 mempunyai kesimpulan : Kerusakan ekosistem terumbu karang dan mangrove, terjadinya konflik pemanfaatan potensi ruang kawasan pesisir serta penyimpangan pola pemanfaatan ruang pesisir di Kabupaten Lombok Barat merupakan tanggungjawab dari Pemerintah daerah pada khususnya sebagai pembuat kebijakan publik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa RSWP3K belum sepenuhnya dijadikan sebagai acuan bagi RPJMD, namun program / kegiatan terkait telah dilaksanakan, hal tersebut terjadi karena keserupaan sasaran RPJPD dengan RSWP3K selain itu juga karena tugas pokok dan fungsi terkait dari masing masing dinas atau instansi. Hambatan-hambatan yang dijumpai dalam implementasi kebijakan tersebut antara lain kepentingan kelompok sasaran yang belum cukup terakomodir, letak RSWP3K yang dianggap kurang tepat, sumber daya finansial dan SDM yang masih kurang, komunikasi yang lemah, penempatan pegawai / pejabat pada posisi yang kurang tepat dan kesadaran masyarakat yang masih rendah.

Penelitian yang pertama fokus pada pengambilan kebijakan dan strategi pengembangan pariwisata apa yang harus diambil oleh pemerintah. Penelitian yang kedua fokus pada apakah implementasi kebijakan pada destinasi yang telah dilaksanakan telah sesuai dengan tujuan dari implementasi tersebut, sedangkan penelitian yang sedang dilaksanakan oleh penulis adalah tentang implementasi kebijakan pengembangan pariwisata pada pembangunan kelembagaan yang ada di Kabupaten Pesisir Barat.

## 2.2. Pengertian kebijakan Publik

Kebijakan adalah pedoman untuk bertindak. Pedoman itu bisa saja amat sangat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam maknanya seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktifitas-aktifitas tertentu, atau suatu rencana. Kebijakan pada dasarnya menitikberatkan pada “publik dan masalah-masalahnya”. Kebijakan membahas bagaimana isu-isu dan persoalan tersebut disusun (*constructed*), didefinisikan serta bagaimana semua persoalan tersebut diletakan dalam agenda kebijakan. Charles. L. Cocchran (1999:2) mengemukakan inti dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah adalah “*policy consists of political decision for implementing program to achieve social goal*” (kebijakan terdiri dari keputusan politis untuk mengimplementasikan program dalam meraih tujuan demi kepentingan masyarakat).

Menurut W. I Jenks (1978:2) dalam bukunya *Public Analysis* mengemukakan bahwa : “ kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang saling terkait yang ditetapkan oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam situasi dimana keputusan-keputusan itu pada dasarnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor”. Berdasarkan pendapat tersebut menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan sesuatu keputusan ditetapkan pemerintah yang saling berhubungan satu sama lain dengan mempunyai tujuan

yang mencapai keberhasilan suatu kebijakan tentunya dengan memiliki kewenangan-kewenangan yang mempunyai batas-batas tertentu, sedangkan definisi yang diberikan oleh Thomas R. Dye yang mengatakan bahwa kebijakan publik pada umumnya mengandung pengertian mengenai “*What ever goverment choose to do or not to do*”. Artinya, kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (dalam Winarno, 2014:15). Lain halnya definisi yang diberikan oleh Hogwood dan Gunn yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu (dalam Suharto, 2008:3).

Disamping itu Hogwood dan Gunn menyebutkan sepuluh penggunaan istilah “kebijakan” dalam pengertian modern yakni sebagai label untuk sebuah bidang aktifitas, sebagai ekspresi tujuan umum atau aktifitas negara yang diharapkan, sebagai profosal spesifik, sebagai keputusan pemerintah, sebagai otoritas formal, sebagai sebuah program, sebagai output, sebagai hasil, sebagai teori atau model dan juga sebagai proses (dalam Wayne Parsons, 2014:15). Menurut Landau, kebijakan publik sebagai bentuk lain dari analisis politik yang menggunakan metafora atau model sebagai perangkat untuk menjelajahi dunia yang tidak dikenal dan mungkin tidak diketahui secara politik “*Public Policy, as other forms of political analysis, uses metaphors or models as devices to explore the unknown and possibly unknowable world of political*” (dalam Edi soeharto, 2004:23).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat atau dipilih untuk diambil oleh suatu lembaga pemerintah, baik



pejabat maupun instansi pemerintah yang merupakan pedoman pegangan ataupun petunjuk bagi setiap aparatur pemerintah, sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam pencapaian tujuan kebijakan dalam kenyataannya, kebijakan sering kali diartikan dalam peristilahan lain seperti tujuan, program, keputusan, Undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan-rancangan besar. Kebijakan publik sering kali dikaitkan dengan keputusan atau ketetapan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap akan membawa dampak baik bagi kehidupan warganya, kemudian berkaitan dengan penelitian ini juga dapat disebutkan bahwa program pengembangan destinasi Pariwisata umumnya Provinsi Lampung dan khususnya yang ada di Kabupaten Pesisir Barat, sebuah kebijakan yang telah dibuat atau dipilih oleh pemerintah.

### **2.3 Tahap- tahap Kebijakan Publik**

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli yang mengkaji kebijakan publik membagi proses proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Tujuan pembagian ini adalah untuk memudahkan dalam mengkaji kebijakan publik. Winarno dalam buku yang berjudul Kebijakan Publik teori, proses dan studi kasus (2014 : 35-37) membagi tahapan kebijakan sebagai berikut :

#### **a. Tahapan Penyusunan Agenda**

Pada tahap ini para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetensi terlebih

dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk kedalam agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak di sentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

b. Tahap Formulasi Kebijakan

Pada tahap ini, masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan akan dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah ini di defenisikan kemudian dicarikan pemecahan masalah publik. Pemecahan masalah berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Pada tahap ini masing masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil guna memecahkan masalah. Pada tahap ini pula masing-masing aktor akan “bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

c. Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhir salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan mayoritas legislatif, konsensus, antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan.

d. Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan catatan elite, jika program tersebut tidak di implementasikan / dijalankan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplentasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-

badan administrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana, namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e. Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa dalam sebuah kebijakan harus dimulai dengan beberapa tahapan yang harus dilalui. Hingga nantinya dapat apa dan bagaimanakah sebuah kebijakan dihasilkan serta sejauhmana dampaknya berpengaruh kepada sasaran kebijakan. Untuk mengetahui kedua hal tersebut suatu evaluasi kebijakan harus dilakukan oleh pemerintah itu sendiri.

Menurut Wayne Parsons membagi tipe evaluasi menjadi 2 yakni :

**1. Evaluasi Formatif**, evaluasi ini merupakan evaluasi yang dilakukan ketika kebijakan / program sedang diimplementasikan dan apa kondisi yang bisa meningkatkan keberhasilan implementasi program tersebut. Oleh karena itu, menurut Palumbo dalam Parsons (2014 : 549) fase implementasi memerlukan evaluasi formatif yang memonitor cara dimana sebuah program dikelola dan diatur untuk menghasilkan umpan balik yang bisa berfungsi untuk meningkatkan proses implementasi. Rosse dan Freeman dalam Parson (2014 : 550) mendiskripsikan model evaluasi ini sebagai evaluasi pada tiga persoalan untuk nanti dapat diketahui efektivitas dari sebuah program yakni:

a. Sejauhmana sebuah program mencapai target populasi yang tepat.

Target sasaran merupakan faktor penting dalam sebuah implementasi suatu kebijakan. Setiap kebijakan yang dirumuskan memiliki target dan tujuan, hal tersebut dapat dijadikan sebuah indikator dalam penelitian sebuah kebijakan yang dijalankan. Untuk mengukur kinerja kebijakan tentunya menegaskan target dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaku kebijakan. Kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian target dan sasaran tersebut. Pemahaman tentang maksud umum dari suatu pencapaian target sasaran kebijakan memiliki arti yang sangat penting. Dengan pencapaian target yang telah ditentukan dalam menjalankan kebijakan akan dikatakan berhasil apabila target yang ditentukan tercapai sama dengan hasil yang didapat setelah dijalankan.

b. Apakah penyampaian mekanisme pelayanannya konsisten dengan spesifikasi desain program atau tidak.

Menurut Waller dalam Parson (2014 : 519) mekanisme atau prosedur berfungsi untuk memastikan bahwa diseluruh organisasi semua orang mengerjakan sesuatu dengan cara yang sama dan bekerja sbagaimana semua orang bekerja.

c. Sumber Daya apa yang digunakan dalam melaksanakan program

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan membutuhkan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam.

2. **Evaluasi Sumatif** : Jenis pendekatan evaluasi ini adalah suatu evaluasi yang berusaha mengukur bagaimana kebijakan atau program secara aktual berdampak pada problem yang ia tangani. Evaluasi ini dimaksudkan untuk memperkirakan efek dari intervensi. Pendekatan ini merupakan model penelitian komperatif yang akan membandingkan, misalnya sebelum dan sesudah, membandingkan apa yang terjadi dengan apa yang mungkin terjadi tanpa intervensi, kemudian salah satu model yang paling penting dari evaluasi suamatif / dampak adalah gagasan pengukuran dampak dengan melakukan semacam eksperimen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari adanya tipe tipe maupun pendekatan evaluasi kebijakan dapat digunakan untuk menilai bahkan mengubah kebijakan-kebijakan dan program-program lain dimasa depan.

## 2.4 Implementasi Kebijakan

### a. Definisi Implementasi Kebijakan

Implementasi yang merupakan terjemahan dari kata “*implementation*” berasal dari kata kerja “*to implement*”. Menurut *Webster’s Dictionary* (dalam Tachan, 2008 : 29) kata *to implement* berasal dari bahasa Latin “*implementum*” dari asal kata “*impere*” dan “*Plere*”, kata “*impere*” dimaksudkan “*to fill up*”, “*to fill*” yaitu mengisi. Dalam *Webster’s Dictionary* (dalam Tachan, 2008 : 29) selanjutnya kata “*to Implement*” dimaksud sebagai :

- 1) *To carry into effect ;accomplish*
- 2) *To provide with the means for carrying out into effect or fulfilling ;to give practical effect to.*
- 3) *To provide or equipwith implements*

**Pertama**, *to implement* dimaksud membawa kesuatu hasil (akibat) melengkapi dan menyelesaikan.

**Kedua** , *to implement* dimaksud menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu.

**Ketiga** , *to emplement* dimaksud menyediakan / melengkapi dengan alat.

Sehubungan dengan kata implementasi diatas, Pressman dan Wildavsy (dalam Tachan, 2008 : 29) mengemukakan bahwa, *implementation as to carry out, accomplish fulfil l produce, complete*. Maksudnya membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, melengkapi. Jadi secara etimologis implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bernilai dengan menyelesaikan suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil.

Apabila pengertian implementasi diatas dirangkaikan dengan kebijakan publik maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan /disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan.

Dengan demikian, dalam proses kebijakan publik implementasi kebijakan merupakan tahap yang bersifat praktis dan dibedakan dari formulasi kebijakan yang dapat dipandang sebagai tahapan yang bersifat teoritis. Anderson (dalam Tachan, 2008 : 30) mengemukakan bahwa : *policy implementation is the application of the policy by the government's administrative machinery to the problem* “. Kemudian Edwar III (dalam Thacan, 2008 : 30) mengemukakan bahwa “ *Policy implementation ...is the stage of policy making between the establishment of a policy ... and the consequences of the policy for the people whom it affects*”. Sedangkan Grandle (dalam Thacan, 2008 : 30) mengemukakan bahwa: “*Implementation –a general process of administrative action that can be investigated at specific program level*”.

Dari uraian diatas diperoleh suatu gambaran bahwa, implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan / disetujui. Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika yang top-down, maksudnya menurunkan /menapsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro, sedangkan formulasi kebijakan mengandung logika *bottom up*, dalam proses ini diawali dengan pemetaan kebutuhan publik pengakomodasian tuntutan lingkungan lalu

diikuti dengan pencarian dan pemilihan alternatif cara pemecahannya, kemudian diusulkan untuk ditetapkan.

Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan mutu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Namun, dalam prakteknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang sangat kompleks dan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi dari berbagai kelompok. Eugene Bardach (1991 : 30) dalam Agustino (2008 : 138) menggambarkan kerumitan proses implementasi yaitu Membuat sebuah program dan kebijakan yang kelihatannya bagus diatas kertas lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang “Tanpa implementasi, suatu kebijakan hanyalah merupakan sebuah dokumen yang tidak bermakna dalam kehidupan bermasyarakat”.

#### **b. Model Implementasi Kebijakan**

Implementasi merupakan suatu proses mengubah gagasan atau program menjadi tindakan dan bagaimana kemungkinan cara menjalankan perubahan tersebut. Untuk menganalisis bagaimana proses implementasi kebijakan itu berlangsung secara efektif, maka dapat dilihat dari berbagai model-model yang membahas tentang implementasi kebijakan yang relatif baru dan banyak mempengaruhi berbagai pemikiran maupun tulisan para ahli.



Berikut beberapa model implementasi kebijakan dari berbagai ahli :

### **1. Model yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn**

Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebutkan dengan *A Model Of the Policy Implementation*. Proses Implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu pengejawantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2012 : 142) ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi yakni :

- a. Ukuran dan tujuan kebijakan
- b. Sumber daya
- c. Karakteristik agen pelaksana
- d. Sikap / kecenderungan para pelaksana
- e. Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas pelaksana
- f. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

### **2. Model yang dikemukakan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabtier**

Model Implementasi kebijakan publik yang ditawarkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabtier disebut dengan *A Framework for policy Implementation Analysis*. Kedua ahli kebijakan ini berpendapat bahwa peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi.

### **3. Model yang dikemukakan oleh Marilee S. Grandle**

Model yang berpendekatan *top down* yang dikemukakan oleh Marilee S. Grandle. Pendekatannya dikenal dengan *Implementation as A Political and Administrative Process*. Menurut Grandle ada dua yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil, yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang diraih. Keberhasilan suatu implementasi juga menurut Grandle, amat ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu sendiri yang terdiri atas *Content Of Policy* dan *context of policy*.

### **4. Model yang dikemukakan oleh George C. Edwards III**

Menurut George C. Edwards III dalam bukunya *Implementing Public Policy* (1980) yang dikutip dalam *web-site*, dalam mengajukan pendekatan implementasi dengan terlebih dahulu mengemukakan dua pertanyaan pokok, yakni :

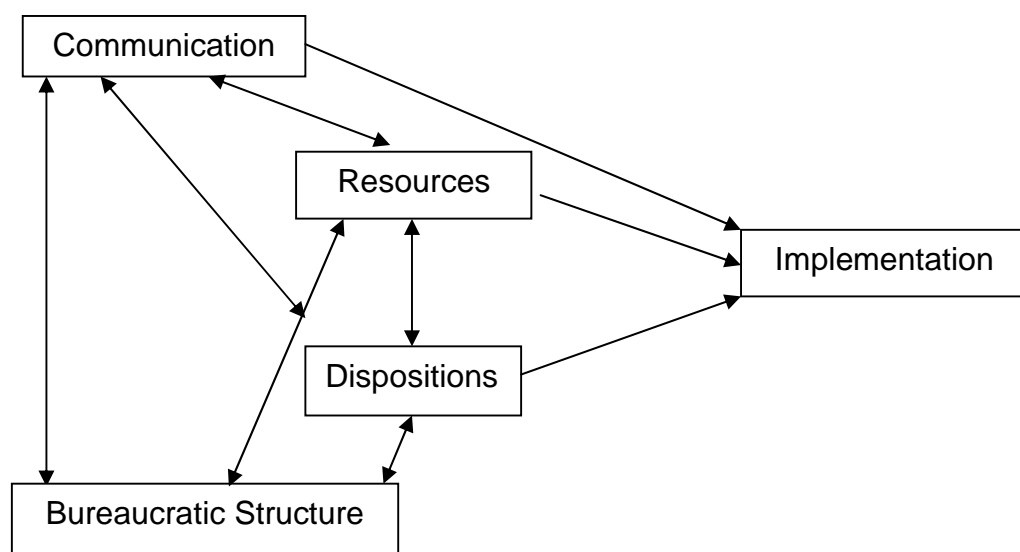
- 1) Faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan
- 2) Faktor yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan

Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut dirumuskan empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi, yakni (1) komunikasi (*communications*), (2) sumber daya (*resources*), (3) sikap birokrasi atau pelaksana (*dispositions* atau *attitudes*) dan (4) struktur organisasi (*burehcratic structure*), termasuk tata aliran kerja birokrasi. Empat faktor tersebut menjadi kriteria penting dalam implementasi suatu kebijakan.

Ke-empat faktor diatas harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat. Tujuannya adalah

meningkatkan pemahaman tentang implementasi kebijakan. Penyederhanaan pengertian dengan cara membreakdown (diturunkan) melalui eksplanasi implementasi ke dalam komponen prinsip.

Implementasi kebijakan adalah suatu proses dinamik yang mana meliputi interaksi banyak faktor. Sub kategori dari faktor-faktor mendasar ditampilkan sehingga dapat diketahui pengaruh terhadap implementasi.



Sumber : George C. Edwards III  
Implementasi *public policy*

Gambar 1. Dampak langsung dan tidak langsung dalam implemntasi

Faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi menurut George c. Edwards III sebagai berikut:

1) **Komunikasi** yaitu : implentasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung-jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan pelaksana.

Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu di komunikasikan sehingga implementors mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggung-jawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personal dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan diarahkan para implementor kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan.

**2) Sumber daya** yaitu: Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi inipun cenderung tidak efektif. Dengan demikian, sumber-daya dapat merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik. Sumber daya yang penting meliputi: staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul diatas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

**3) Disposisi atau Sikap** adalah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Ada tiga bentuk sikap / respon implementator terhadap kebijakan kesadaran pelaksana, petunjuk arahan pelaksana untuk merespon program ke arah penerimaan/penolakan dan intensitas dari respon tersebut para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tetap karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program.

Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program. Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah menetapkan kebijakan menjadi prioritas program, penetapan pelaksanaan dengan orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup berguna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan / program.

**4) Struktur Birokrasi** adalah : Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-

badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Bila sumber daya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, implementasi masih gagal apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak orang, serta pemborosan sumber daya akan mempengaruhi hasil implementasi. Perubahan yang dilakukan tentunya akan mempengaruhi individu dan secara umum akan mempengaruhi sistem dalam birokrasi.

## **2.5 Pariwisata**

Pengertian istilah pariwisata akan lebih mudah dipahami apabila didahului dengan mengetahui faktor-faktor yang terkandung dalam definisi pariwisata tersebut.

Faktor-faktor yang dimaksudkan adalah :

- a) Perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu.
- b) Perjalanan yang dilakukan dari suatu tempat ke tempat lainnya.
- c) Perjalanan itu, harus selalu dikaitkan dengan rekreasi.
- d) Orang yang melakukan perjalanan tersebut tidak mencari nafkah di tempat yang dikunjunginya.

Berdasarkan faktor-faktor di atas, maka istilah pariwisata secara luas dapat dilihat dari beberapa definisi sebagai berikut :

Menurut *World Tourism Organization* (WTO) (Pitana, 2009 dalam Pengantar Ilmu Pariwisata), pariwisata adalah kegiatan seseorang yang bepergian ke atau tinggal di suatu tempat di luar lingkungannya yang biasa dalam waktu tidak lebih

dari satu tahun secara terus menerus, untuk kesenangan, bisnis ataupun tujuan lainnya. Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan yang dimaksud pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

Dalam bahasa Inggris istilah kata pariwisata diterjemahkan dengan “*tourism*” dan pelaku perjalanan pariwisata diterjemahkan menjadi “*tourist*” dan “*excursionist*”. Menurut rumusan *International Union of Official Travel Organization* (IUOTO, kini UN-WTO) dalam Pitana (2009) pada Tahun 1963, yang dimaksud dengan *tourist* dan *excursionist* adalah sebagai berikut :

1. Wisatawan (*tourist*), yaitu pengunjung sementara yang paling sedikit tinggal selama 24 jam di negara yang dikunjunginya dengan tujuan perjalanan :
  - a. Pesiari, untuk keperluan rekreasi, liburan, kesehatan, studi, keagamaan dan olah raga.

- b. Keluarga, bisnis, konferensi.
2. Pelancong (*excurtionists*) adalah pengunjung sementara yang tinggal kurang dari 24 jam di negara yang dikunjunginya (termasuk pelancong dengan kapal pesiar).

Menurut Norval dalam Muhammad Ilyas (2009), wisatawan ialah setiap orang yang datang dari suatu negara asing, yang alasannya bukan untuk menetap atau bekerja disitu secara teratur, dan yang di negara dimana ia tinggal untuk sementara itu membelanjakan uang yang didapatkannya di lain tempat. Pada Tahun 1937, Komisi Ekonomi Liga Bangsa-bangsamenyebutkan motif-motif yang menyebabkan orang asing dapat disebut wisatawan. Mereka yang termasuk wisatawan adalah :

- a. Orang yang mengadakan perjalanan untuk bersenang-senang (*pleasure*), karena alasan keluarga, kesehatan dan sebagainya.
- b. Orang yang mengadakan perjalanan untuk mengunjungi pertemuan-pertemuan atau sebagai utusan (ilmiah, administratif, diplomatik, keagamaan, atletik dan sebagainya).
- c. Orang yang mengadakan perjalanan bisnis.
- d. Orang yang datang dalam rangka pelayaran pesiar (*sea cruise*), kalau ia tinggal kurang dari 24 jam.

Secara umum pariwisata sebagai bagian dari kegiatan dalam sistem perwilayahan dapat diidentifikasi tiga unsur pembentuk terjadinya kegiatan wisata yaitu :

- a. Ruang merupakan tempat kegiatan wisata berlangsung dimana kondisi fisik yang bersifat alami maupun binaan yang mempengaruhi perkembangan wisata,



sesuai dengan daya tarik wisata yang dimiliki. Tingkat daya hubung antara lokasi wisata dengan sumber pasar juga merupakan hal yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan yang terjadi.

- b. Manusia sebagai pelaku kegiatan wisata baik sebagai pengelola maupun pemakai. Sebagai pemakai, wisatawan memiliki karakteristik yang akan mempengaruhi perilaku wisatanya. Sebagai pengelola, produsen jasa wisata ini juga memiliki perilaku yang berbeda karena faktor internal maupun eksternalnya.
- c. Sarana dan prasarana merupakan faktor penunjang yang menghubungkan tempat asal wisatawan dan tujuan wisatanya. Pariwisata dewasa ini adalah sebuah mega bisnis. Jutaan orang mengeluarkan triliunan dollar, meninggalkan rumah dan pekerjaan untuk memuaskan dan membahagiakan diri dan untuk menghabiskan waktu luang. Hal ini menjadi bagian penting dalam kehidupan dan gaya hidup di negara-negara maju. Menempatkan pariwisata sebagai bagian esensial dalam kehidupan sehari-hari merupakan fenomena yang relatif baru. Hal ini mulai terlihat sejak berakhirnya Perang Dunia II, dimana pariwisata meledak dalam skala besar sebagai salah satu kekuasaan sosial dan ekonomi.

Sesungguhnya pariwisata telah dimulai sejak dimulainya peradaban manusia itu sendiri, yang ditandai oleh adanya pergerakan manusia yang melakukan ziarah atau perjalanan agama lainnya. Namun demikian tonggak-tonggak sejarah dalam pariwisata sebagai fenomena modern dapat ditelusuri dari perjalanan Marcopolo (1254-1324) yang menjelajahi Eropa sampai ke Tiongkok untuk kembali ke

Venesia, yang kemudian disusul perjalanan Pangeran Henry (1394-1460), Cristopher Colombus (1451-1506), dan Vasco da Gama (akhir abad XV). Sedangkan sebagai kegiatan ekonomi, pariwisata baru berkembang pada awal abad ke-19, dan sebagai industri internasional, pariwisata dimulai Tahun 1869. Sekitar Tahun 1740-an di Inggris Raya dan Eropa dikenal istilah *Grand Tour* yang berarti perjal dan tujuan lain yang bersifat budaya oleh orang muda dari kelas atas. Oleh karenanya, *leisure tour* atau *tourism* dianggap memiliki cikal bakal dari peradaban barat. Saat ini setiap tahun jutaan orang meniru pola tersebut yang secara luas dikenal sebagai kegiatan pariwisata. Umumnya perjalanan yang dilakukan dalam era *Grand Tour* ini adalah untuk kebutuhan hiburan dalam beragam bentuknya dan kebanggaan status dengan kemampuan mengklaim bahwa mereka sudah pernah ke suatu tempat dan melihat sesuatu ditempat tersebut.

Tahun 1840-an mulai diberangkatkan sekelompok orang (*group*) dalam paket modern atau tur inklusif. Mula-mula dalam wilayah Inggris dan kemudian berkembang ke daratan Eropa. Tahun 1840-an merupakan awal dilakukannya perjalanan jauh dengan menggunakan sistem transportasi massal. Pada abad ke-20, khususnya periode Tahun 1960 ke 1980, tampak adanya peningkatan pesat pada jumlah orang yang melakukan perjalanan wisata.

Untuk perkembangan kebijakan pariwisata dunia dimulai seiring perkembangan industri pariwisata. Pada era 1980-an terjadi perubahan paradigma dari pariwisata massal ke pariwisata alternatif yang mana industri telah memasuki era globalisasi, teknologi baru, dan meningkatnya kepedulian dan tanggung jawab sosial dan ekologi. Persaingan menjadi fungsi utama dalam industri

pariwisata. Kualitas dan efisiensi menjadi kunci utama dalam pariwisata alternatif dibanding kuantitas yang menjadi modus pelaksanaan pariwisata massal.

Perkembangan kebijakan pariwisata dunia telah mengalami tiga tahapan generasi yang berbeda, yaitu sebagai berikut :

1. Paradigma kebijakan pariwisata massal. Generasi ini didasarkan pada target pencapaian jumlah wisatawan sebesar-besarnya, pencapaian pendapatan pariwisata yang sebesar-besarnya, dan penciptaan lapangan kerja di sektor pariwisata.

2. Paradigma kebijakan pariwisata untuk kesejahteraan sosial.

Periode ini dimulai sekitar Tahun 1970-an ketika krisis ekonomi melanda dunia, termasuk pertumbuhan ekonomi yang berfluktuasi serta masa resesi yang panjang. Dalam periode ini dampak sosial, ekonomi, dan ekologi akibat keberadaan pariwisata sudah mulai disadari sementara fokus pada pertumbuhan ekonomi mulai pengembangan pariwisata mulai diredefinisi. Peran pariwisata mulai digeser ke pencapaian kesejahteraan sosial, bukan lagi pada pertumbuhan ekonomi semata.

3. Paradigma kebijakan pariwisata terpadu (*holistic*). Pada periode ini mulai disadari bahwa sisi persaingan memegang peran menentukan dalam industri pariwisata. Kemitraan antara pemerintah, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat diberi penekanan lebih sehingga mendorong hubungan yang simbiotik antar sektor. Diskusi kebijakan pembangunan pariwisata bergeser dari sisi konvensional seperti pemasaran, promosi, pajak, insentif,

akomodasi dan transportasi menuju isu yang lebih *holistic* yang berkaitan dengan lingkungan, dampak sosial, pemerataan, serta regulasi pariwisata internasional yang menyangkut keamanan dan kesehatan.

## **2.6 Sumber Daya**

Sumber daya yang terkait dengan pengembangan pariwisata umumnya berupa sumber daya alam dan sumber daya budaya, di samping sumber daya manusia. Orang ataupun organisasi menggunakan sumber daya untuk beragam kegiatan pariwisata. Misalnya, di tempat kerja operator pariwisata digunakan sumber daya manusia (tenaga kerja), fasilitas dan peralatan (sumber daya fisik), menyediakan atraksi budaya sebagai daya tarik wisata (sumber daya budaya), dan menjual pemandangan alam sebagai atraksi wisata (sumber daya alam). Muaranya sebenarnya sama, yaitu bagaimana menggunakan sumber daya, baik secara individual maupun kombinasinya untuk memuaskan keinginan wisatawan yang beragam sesuai harapan.

### **a. Sumber Daya Alam**

Elemen dari sumber daya, misalnya, air, pepohonan, udara, hamparan pegunungan, pantai, bentang alam, dan sebagainya, tidak akan menjadi sumber daya yang berguna bagi pariwisata kecuali semua elemen tersebut dapat memuaskan dan memenuhi kebutuhan manusia. Oleh karenanya, sumber daya memerlukan intervensi manusia untuk mengubahnya agar bermanfaat. Unsur-unsur alam sebenarnya bersifat netral sampai manusia mentransformasikannya menjadi sumber daya. Hal ini juga dipengaruhi oleh budaya yang menentukan

siapa yang menggunakan sumber daya dan bagaimana sumber daya tersebut digunakan.

## **2.7 Jenis-jenis Wisata**

Wisata berdasarkan jenis-jenisnya dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu :

1. Wisata Alam, yang terdiri dari :

- a. Wisata Pantai (*marine tourism*), merupakan kegiatan wisata yang ditunjang oleh sarana dan prasarana untuk berenang, memancing, menyelam, dan olahraga air lainnya, termasuk sarana dan prasarana akomodasi, makan dan minum.
- b. Wisata Etnik (*etnik tourism*), merupakan perjalanan untuk mengamati perwujudan kebudayaan dan gaya hidup masyarakat yang dianggap menarik.
- c. Wisata Cagar Alam (*ecotourism*), merupakan wisata yang banyak dikaitkan dengan kegemaran akan keindahan alam, kesegaran hawa udara di pegunungan, keajaiban hidup binatang (*margasatwa*) yang langka, serta tumbuh-tumbuhan yang jarang terdapat di tempat-tempat lain.
- d. Wisata Buru, merupakan wisata yang dilakukan di negeri-negeri yang memang memiliki daerah atau hutan tempat berburu yang dibenarkan oleh pemerintah dan digalakkan oleh berbagai agen atau biro perjalanan.
- e. Wisata Agro, merupakan jenis wisata yang mengorganisasikan perjalanan ke proyek-proyek pertanian, perkebunan, dan ladang pembibitan di mana wisata rombongan dapat mengadakan kunjungan dan peninjauan untuk tujuan studi maupun menikmati segarnya tanaman di sekitarnya.

## 2. Wisata Sosial-Budaya, yang terdiri dari :

- a. Peninggalan sejarah kepurbakalaan dan monumen, wisata ini termasuk golongan budaya, monumen nasional, gedung bersejarah, kota, desa, bangunan-bangunan keagamaan, serta tempat-tempat bersejarah lainnya seperti tempat bekas pertempuran (*battle fields*) yang merupakan daya tarik wisata utama di banyak negara.
- b. Museum dan fasilitas budaya lainnya, merupakan wisata yang berhubungan dengan aspek alam dan kebudayaan di suatu kawasan atau daerah tertentu. Museum dapat dikembangkan berdasarkan pada temanya, antara lain museum arkeologi, sejarah, etnologi, sejarah alam, seni dan kerajinan, ilmu pengetahuan dan teknologi, industri, ataupun dengan tema khusus lainnya.

## **2.8. Kawasan dan Obyek Wisata**

### 1. Kawasan Wisata

Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya (Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang). Lebih lanjut dalam regulasi tersebut dijelaskan maksud daripada wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Adisasmita, 2007 (dalam Muhammad Ilyas, 2009) mencoba menjelaskan maksud dari kawasan wisata dengan menelaah kedua komponen tersebut. Kawasan adalah bentangan permukaan (alam) dengan batas-batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional. Kawasan memiliki fungsi tertentu (misalnya

kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan pesisir pantai, kawasan pariwisata, dan lain-lain). Wisata berarti perjalanan atau bepergian. Jadi kawasan wisata adalah bentangan permukaan yang dikunjungi atau didatangi oleh orang banyak (wisatawan) karena kawasan tersebut memiliki obyek wisata yang menarik.

## 2. Obyek Wisata

Suwantoro, 1997 (dalam Muhammad Ilyas, 2009) menjelaskan bahwa obyek wisata terdiri dari keindahan alam (*natural amenities*), iklim, pemandangan, flora dan fauna yang aneh (*uncommon vegetation and animals*), hutan (*the sylvan elements*), dan sumber kesehatan (*healthcenter*) seperti sumber air panas belerang, dan lain-lain. Disamping itu, obyek wisata yang diciptakan manusia seperti kesenian, festival, pesta ritual, upacara perkawinan tradisional, khitanan dan lain-lain semuanya disebut sebagai atraksi wisata (*tourist attraction*).

Daya tarik wisata yang juga disebut obyek wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata, dikelompokkan kedalam obyek dan daya tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata minat khusus. Dalam penentuan obyek wisata berdasarkan pada kriteria-kriteria antara lain:

1. Adanya sumberdaya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah, nyaman, dan bersih.
2. Adanya aksesibilitas yang tinggi untuk dapat mengunjunginya.
3. Adanya ciri khusus / spesifikasi yang bersifat langka.

4. Adanya sarana dan prasarana penunjang untuk melayani parawisatawan yang hadir.
5. Obyek wisata alam mempunyai daya tarik tinggi, karena keindahan alam pegunungan, sungai, pantai, pasir, hutan, dan sebagainya.
6. Obyek wisata budaya mempunyai daya tarik karena memiliki nilai khusus dalam bentuk atraksi kesenian, upacara adat, nilai luhur yang terkandung dalam suatu obyek buah karya manusia pada masa yang lampau.

## **2.9 Konsumsi Wisatawan**

Adalah barang dan jasa (*good and service*) yang dibeli oleh wisatawan dalam rangka memenuhi kebutuhan (*needs*), keinginan (*wants*) dan harapan (*expectation*) selama ia tinggal di daerah tujuan wisata yang dikunjunginya. Adapun komponen konsumsi wisatawan sesuai dengan *General Guideline For Developing The Tourism Satellite Account* (WTO). Berdasarkan *System National Account* (SNA) Tahun 1993, pengertian konsumsi adalah sebagai berikut :

1. Pengertian Konsumsi
  - a. Konsumsi akhir penggunaan barang dan jasa untuk keperluan rumah tangga atau lembaga non-profit yang melayani rumah tangga. Konsep ini menggunakan konsep akuisisi.
  - b. Konsumsi antara, yaitu penggunaan barang dan jasa untuk diproses menjadi produk lain.
2. Konsumsi Wisatawan adalah total konsumsi yang diakibatkan oleh pelaksanaan perjalanan ke suatu tempat tujuan, mulai dari perencanaan keberangkatan hingga kembali dari perjalanan (yang dilakukan).



3. Pengeluaran konsumsi akhir wisatawan, dibedakan menjadi:
  - a. Pengeluaran secara tunai, yaitu segala pengeluaran yang dibayarkan secara tunai.
  - b. Konsumsi dalam bentuk barang, yaitu segala pengeluaran yang dihargai dalam bentuk barang.
4. Konsumsi Wisatawan, selama perjalanan (*visitor consumption while travelling*)  
WTO memberi rekomendasi atas :
  - a. Paket Perjalanan Wisata (*Package Tours*)
  - b. Akomodasi
  - c. Makanan dan minuman
5. Konsumsi wisatawan / pengunjung selama dalam perjalanan (*visitor consumption while travelling*), *WTO Recommendations* antara lain :
  - a. Paket perjalanan dan paket liburan
  - b. Akomodasi
  - c. Makanan dan minuman
  - d. Transportasi
  - e. Rekreasi, budaya dan olah raga
  - f. Belanja
  - g. Lainnya
6. Konsumsi wisatawan / pengunjung sebelum melakukan perjalanan (*Pre-Trip Visitors Consumption*) terdiri atas:
  - a. Barang-barang tahan lama (*durable goods*) dapat digunakan lebih dari satu kali perjalanan, antara lain : kamera teropong kaca mata (*sun glass*), bola

golf, perlengkapan camping, peralatan rekreasi pantai (*surfing, diving, fishing, skying*).

b. Barang-barang tidak tahan lama (*Non-Durable Goods*) seperti: makanan dan minuman, parfum, lotion, BBM, film, baterai, bola tenis, rokok, dan cerutu.

7. Konsumsi wisatawan/pengunjung selama dalam perjalanan (*On-Trip Consumption*) antara lain dalam bentuk :

- a. Paket perjalanan wisata
- b. Akomodasi
- c. Makanan dan minuman
- d. Transportasi
- e. Rekreasi, budaya dan olahraga
- f. Belanja
- g. Lainnya

Rincian jenis komoditi dibawah ini merupakan konsumsi wisatawan menurut jenis pengeluaran selama wisatawan melakukan perjalanan (*On trip Consumption*), yaitu :

- a. Paket perjalanan wisata mencakup biaya biaya :
  - Tiket dari *Tourist Generating Countries* (TGC) ke Negara *tourist receiving countries* (TRC).
  - Penerbangan domestik.
  - Transportasi dari bandara ke hotel.
  - Transportasi lokal di daerah tujuan wisata yang dikunjungi.
  - Obyek dan kota-kota lain, termasuk kereta api / kapal laut.

- Tips untuk pemandu wisata.
  - Airport tax.
  - Akomodasi hotel.
  - Makan dan minum selama berkunjung.
  - Rekreasi dan hiburan.
  - Cenderamata.
- b. Biaya akomodasi, terdiri dari : hotel bintang, hotel non bintang, *camping site*, sarapan dan bentuk akomodasi lainnya.
- c. Makan dan minuman, terdiri dari :
- Makanan dan minuman yang dikonsumsi di hotel, restoran, cafe, bar dan lain-lain.
  - Makanan dan minuman yang disediakan dalam kendaraan selama dalam perjalanan wisata yang dilakukan
  - Makanan dan minuman yang dibeli di outlet pengecer/swalayan/mall.
- d. Transportasi selama dalam perjalanan, terdiri dari :
- Transportasi dari rumah ke bandara dan sebaliknya.
  - Transportasi dari bandara ke hotel dan sebaliknya.
- e. Rekreasi, budaya dan olah raga, antara lain mencakup :
- Tiket masuk pertunjukan.
  - Sewa perlengkapan rekreasi dan olah raga.
  - Biaya transportasi/BBM yang digunakan untuk menuju tempat rekreasi.

## 2.10 Investasi

Investasi diartikan sebagai suatu kegiatan penanaman modal pada berbagai kegiatan ekonomi dengan harapan untuk memperoleh benefit atau manfaat pada masa yang akan datang. Investasi dibutuhkan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan ekonomi suatu negara. Dari informasi yang tersedia menunjukkan bahwa trend investasi menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu sejalan dengan pembangunan yang dilaksanakan diberbagai bidang. Secara konsep investasi dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu “Investasi Finansial” dan “Investasi Non Finansial”. Investasi finansial lebih dititik beratkan kepada investasi dalam bentuk pemilikan instrumen finansial seperti uang tunai, emas, tabungan, saham dan sejenisnya, sedangkan investasi fisik lebih menekankan pada realisasi berbagai jenis investasi fisik seperti bangunan, kendaraan, mesin-mesin dan sejenisnya. Untuk selanjutnya yang dimaksud dengan investasi dalam kaitannya dengan sektor pariwisata adalah investasi fisik saja.

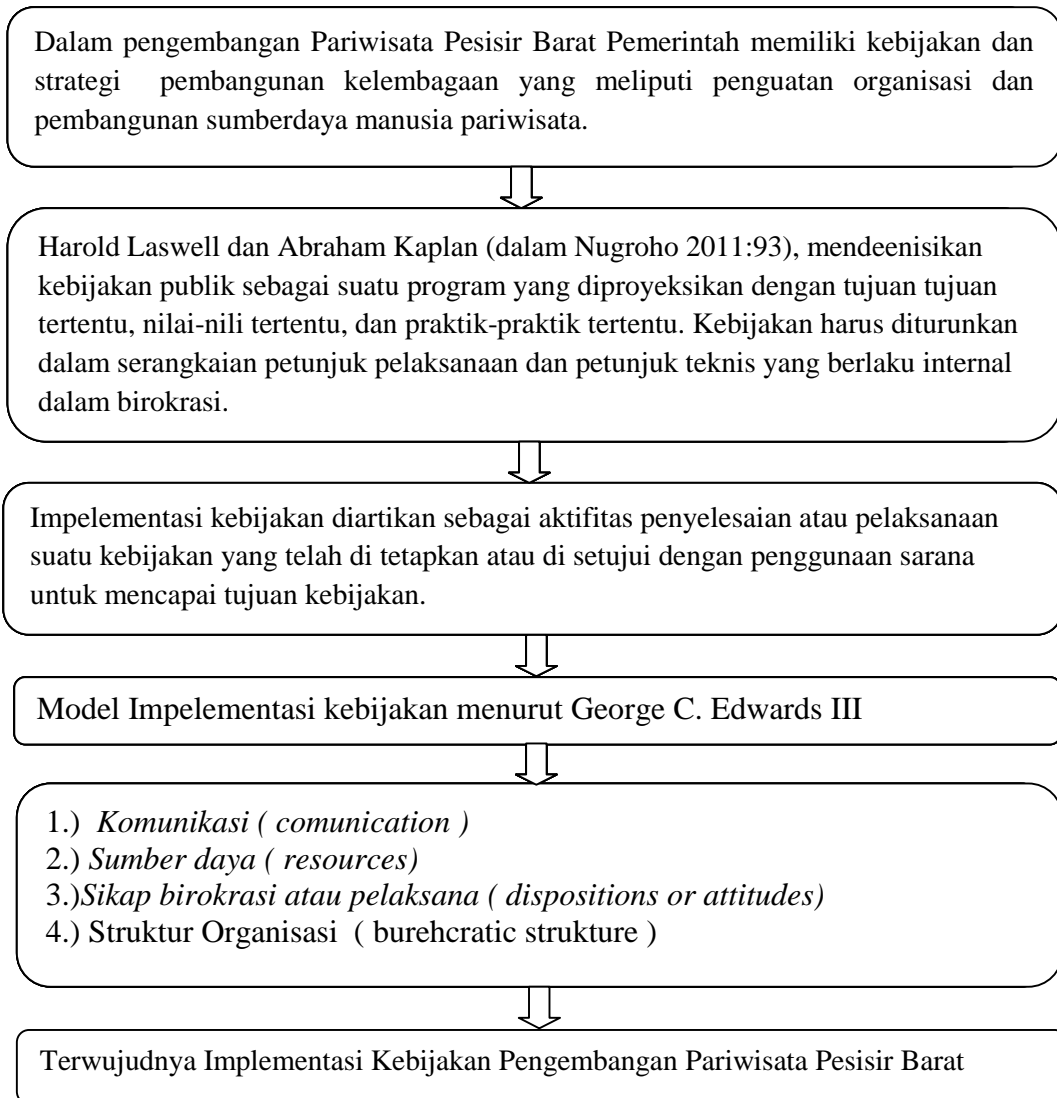
Secara definitif yang dimaksud dengan investasi pariwisata adalah pengeluaran dalam rangka pembentukan modal yang dilakukan oleh sektor-sektor ekonomi yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pariwisata baik secara langsung maupun tidak langsung. Pelaku investasi tersebut adalah produsen penghasil produk barang dan jasa, baik pemerintah, BUMN / BUMD maupun pihak swasta. Investasi fisik tersebut berupa pembuatan bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal (hotel, kantor, tempat hiburan dan sebagainya, pembangunan infrastruktur, pembelian mesin kendaraan dan barang modal lainnya).

## **2.11 Industri Pariwisata**

Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang / dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Industri pariwisata artinya semua usaha barang dan jasa bagi pariwisata yang dikelompokkan ke dalam dua golongan utama yaitu :

- a. Pelaku langsung, yaitu usaha-usaha wisata yang menawarkan jasa secara langsung kepada wisatawan atau yang jasanya langsung dibutuhkan oleh wisatawan. Termasuk dalam kategori ini adalah hotel, restoran, biro perjalanan, pusat informasi wisata, atraksi hiburan, dan lain-lain.
- b. Pelaku tidak langsung, yaitu usaha yang mengkhususkan diri pada produk-produk yang secara tidak langsung mendukung pariwisata, misalnya usaha kerajinan tangan, lembar panduan wisata, penjual roti, dan lain-lain.

## 2.12 Kerangka Pemikiran



Sumber : Diolah Peneliti 2016

Sistematik dalam rangka pengembangan organisasi kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia pariwisata bentuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan di destinasi pariwisata yang meliputi :

1. Penguatan organisasi Kepariwisataan dengan arah kebijakan :
  - Restrukturisasi dan reposisi organisasi kepariwisataan

- Optimalisasi Koordinasi antar dinas
- Optimalisasi Organisasi Kepariwisata swasta dan masyarakat
- Optimalisasi kemitraan usaha pariwisata antar pemerintah daerah,swasta dan masyarakat

Strategi Penguatan organisasi kepariwisataan meliputi :

- Mereposisi urusan pariwisata dilingkungan pemerintah
- Merencanakan partisipasi koordinasi lintas sektor
- Memperkuat peran serta swasta dalam meningkatkan akselerasi pembangunan kepariwisataan
- Memperkuat sinkronisasi antar pemerintah daerah, swasta dan masyarakat
- Memperbaiki pelayanan pemerintah kepada swasta dan masyarakat

2. Pembangunan Sumberdaya manusia pariwisata arah kebijakan meliputi :

- Optimalisasi dan akselerasi kompetensi SDM pemerintah
- Akselerasi Kualitas institusi pendidikan kepariwisataan
- Standarisasi dan sertifikasi SDM industri pariwisata

Strategi untuk pembangunan SDM Pariwisata meliputi :

- Optimalisasi kapasitas SDM pariwisata
- Mengembangkan kerjasama antar institusi pendidikan dan industri pariwisata
- Akselerasi kualitas pendidikan kepariwisataan
- Sertifikasi profesi dibidang kepariwisataan

### **2.13. Hipotesis Kerja**

Berdasarkan kerangka pikir penelitian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Pesisir Barat dilihat dari pembangunan kelembagaan kepariwisataan adalah upaya terpadu dan sistimatik dalam rangka pengembangan organisasi kepariwisataan, pengembangan sumberdaya manusia pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan di destinasi pariwisata.

Pembangunan kelembagaan kepariwisataana meliputi :

- a. Penguatan organisasi kepariwisataan
- b. Pembangunan sumberdaya manusia

Kebijakan pengembangan pariwisata tersebut sangat terkait dengan komunikasi, sumberdaya, sikap birokrasi, dan struktur organisasi dinas pariwisata Kabupaten Pesisir Barat.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif. Istilah penelitian kualitatif menurut Lexy J.Moleong (2005:2) pada mulanya bersumber pada pengamatan kualitatif yang dipertentang dengan pengamatan kuantitatif. Penelitian deskriptif bertujuan agar peneliti dapat menggambarkan dengan lebih baik sifat-sifat yang diketahui keberadaannya serta relevan dengan variable-variabel yang diteliti.

Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena data data yang dikumpulkan dilapangan adalah data-data yang berbentuk kata dan perilaku, kalimat, skema dan gambar dari latar alamiah. Metode kualitatif berupaya untuk memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri dimana sumber data dalam penelitian ini secara sengaja berkembang terus sampai data yang dikumpulkan dianggap memuaskan. Penelitian kualitatif juga berusaha untuk mengungkapkan fenomena secara menyeluruh, sesuai dengan konteksnya (holistik konstektual) dan mendalam (*in-depth*).

Analisis data bersifat (induktif) kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Pada penulisan, peneliti menganalisis data tersebut dan sejauh mungkin dalam bentuk aslinya. Dengan demikian dapat diperoleh gambaran dan penjelasan tentang Implementasi kebijakan pengembangan Pariwisata Pesisir Barat.

### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi dalam penelitian ini adalah destinasi yang ada di Kabupaten Pesisir Barat. Dipilihnya destinasi ini karena Kabupaten Pesisir Barat merupakan Destinasi Kawasan Wisata Unggulan (KWU) Provinsi Lampung dan Kawasan Strategi Pariwisata Nasional (KSPN).

### **3.3 Fokus Penelitian**

Dalam mempertajam penelitian dengan menggunakan metode kualitatif, peneliti menetapkan fokus. Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi study kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan / urgensi masalah yang akan dipecahkan. Penelitian ini di fokuskan pada : Impelementasi dari kebijakan Pembangunan kelembagaan kepariwisataan meliputi:

- a. Penguatan organisasi kepariwisataan
- b. Pembangunan sumberdaya manusia

Pengembangan pariwisata Pesisir Barat pada pembangunan kelembagaan dengan logika positivisme penerapan implementasi kebijakan menggunakan

model yang berpendekatan *Top down* dikemukakan oleh George C. Edwards III yang terdiri atas :

1) Komunikasi (*Communications*)

Apakah ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan.

2) Sumber Daya (*Resources*)

Bagaimana jumlah staf dan sumber dana yang ada dan apakah staf dan pelaksana sudah memiliki keahlian selain itu informasi yang ada apakah sudah relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pemenuhan program, bagaimana kewenangan-kewenang yang ada untuk melaksanakan program sebagaimana yang diharapkan, serta fasilitas pendukung lainnya seperti sarana dan prasarana.

3) Sikap Birokrasi atau Pelaksana (*Dispositions or Attitudes*)

Bagaimana respon implementator terhadap pelaksanaan kebijakan, kesadaran pelaksanaan / arahan untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, serta intensitas responnya bagaimana.

4) Struktur Organisasi (*Burehcratic Structure*)

Kesesuai karakteristik, kesesuain norma, kesesuaian hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dalam apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.

### **3.4. Jenis Dan Sumber Data**

#### **a. Jenis Data**

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan studi deskriptif dengan mengumpulkan data yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari survey lapangan menyangkut obyek yang akan diteliti dan disesuaikan dengan kebutuhan, dalam hal ini pencatatan dan pengamatan langsung mengenai kondisi obyek wisata pada destinasi yang ada di Pesisir Barat. Data juga diperoleh dari wawancara dan observasi yang diperoleh peneliti selama proses pengumpulan data.

Data sekunder, yaitu data-data tertulis yang digunakan sebagai informasi pendukung dalam analisis data primer. Data ini diperoleh dari beberapa instansi yang terkait dengan penelitian ini. Data-data tersebut berupa : Data kebijakan pemerintah yang menyangkut pariwisata; fasilitas infrastruktur pariwisata yang ada di lokasi penelitian; data kunjungan wisatawan; keadaan geografis dan demografis; data sosial budaya dan ekonomi, dan lain-lain.

#### **b. Sumber Data**

Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dari : Kantor Bappeda Pesisir barat untuk memperoleh data mengenai kebijakan yang ada di lokasi penelitian; Kantor Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pesisir Barat untuk memperoleh data kunjungan wisatawan, fasilitas, dan kebijakan sektor pariwisata di lokasi penelitian; kantor BPS, dan Kantor pemerintahan kecamatan untuk memperoleh data geografis dan demografis; survey lapangan.

### **3.5. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

- a. Teknik Pengamatan atau observasi meliputi berbagai hal yang menyangkut pengamatan kondisi fisik dan aktivitas pada lokasi penelitian.
- b. Teknik wawancara yaitu kegiatan mengajukan pertanyaan melalui wawancara guna memperoleh informasi melalui tanya jawab secara langsung dengan responden dan informan.
- c. Teknik dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan dan pengkajian beberapa informasi dari terbitan berkala, buku-buku, literatur dokumen, foto-foto, surat kabar, media elektronik, dan referensi statistik.

### **3.6. Tehnik Analisis Data**

Analisis data menurut Palton dalam (Moleong,2000:103) adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, katagori dan satuan uraian dasar selanjutnya dijelaskan bahwa analisis data dilakukan untuk memberikan arti yang signifikan terhadap data, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian. Prinsip pokok teknik analisis data pada penelitian kualitatif adalah mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, terstruktur dan mempunyai makna.

Analisis data menurut Sutopo dan arief (2010:8) adalah proses analisis kualitatif yang mendasarkan pada adanya hubungan sistimatis antar variabel yang sedang

diteliti. Tujuannya adalah agar peneliti mendapatkan makna hubungan variabel-variabel sehingga dapat digunakan untuk menjawab masalah yang dirumuskan dalam penelitian. Langkah-langkah analisis data pada penelitian kualitatif adalah sebagai berikut :

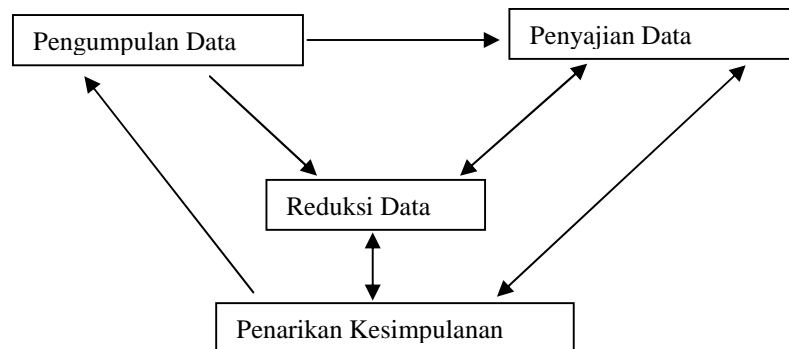
#### 1. Data *Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dan dicari tema dan polanya. Data yang diperoleh dari lapangan, semakin lama akan semakin banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu diperlukan reduksi data untuk memisahkan dari data-data yang tidak penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti : komputer mini atau dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. Dalam hal ini, peneliti melakukan pemilihan data yang telah didapatkan dari lapangan yang dapat diperlukan berdasarkan fokus penelitian dengan batasan data yang ada dalam panduan wawancara yang telah dibuat. Hal tersebut disesuaikan dan dipilih data yang berguna untuk dapat disajikan dalam penyajian data.

#### 2. Data *Display* (Penyajian Data)

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberikan kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, dan pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data

terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami peneliti melakukan pengecekan ulang mengenai data yang telah dipilih pada proses reduksi data. Pengecekan tersebut digunakan agar data yang digunakan dapat dimungkinkan untuk diadakannya suatu kesimpulan.



Sumber : Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief  
Gambar 4. Analisis Data Kualitatif

### 3. Verifikasi (Penarikan Kesimpulan)

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat bersifat sementara apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Pada tahap penarikan kesimpulan, peneliti berusaha untuk memahami, menganalisis dan mencari makna dari kata yang dikumpulkan. Akhirnya setelah data dikumpul akan diperoleh suatu kesimpulan.

Kesimpulan yang didapat adalah berdasarkan penyajian data yang ada. Uraian hasil penelitian dirangkum dalam suatu keterangan mengenai hasil penelitian tersebut. Keterangan tersebut adalah hasil pengecekan ulang tentang fenomena

dilapangan yang terjadi, setelah dibandingkan dengan teori yang ada maka diadakannya suatu penarikan kesimpulan verifikasi.

### **3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data**

Keabsahan data merupakan standar validasi dari data yang diperoleh. Menurut Moleong (2005:173) mengemukakan bahwa untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu dalam pemeriksaan data dan menggunakan kriteria :

#### 1. Teknik Memeriksa Kredibilitas Data (Derajat Kepercayaan)

##### a. Triangulasi

Teknik ini memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Penelitian ini menggunakan triangulasi metode yang meliputi pengecekan beberapa teknik pengumpulan data, dan sumber data dengan metode yang sama. Sedangkan triangulasi metode dan triangulasi teori, oleh sebab itu peneliti melakukannya dengan jalan :

- a) Mengajukan berbagai macam variabel pertanyaan
- b) Mengeceknnya dengan sumber data
- c) Memanfaat

##### b. Kecukupan *Referensial*

Yaitu dengan memanfaatkan bahan-bahan tercatat atau terekam sebagai patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data.



Misalnya, catatan-catatan peneliti selama proses penelitian atau hasil rekaman video tape juga handphone dapat dimanfaatkan untuk membandingkan hasil-hasil yang diperoleh dengan kritik yang telah terkumpul.

## 2. Teknik Memeriksa Keteralihan (*Transferability*)

Kriteria keteralihan menyatakan bahwa generalisasi suatu penemuan dapat berlaku atau ditetapkan pada semua konteks dalam populasi yang sama atas dasar penemuan yang diperoleh pada sample yang secara representatif mewakili populasi itu. Untuk melakukan pengalihan, seorang peneliti hendaknya mencari dan mengumpulkan kejadian empiris tentang kesamaan konteks. Dengan demikian peneliti bertanggungjawab untuk menyediakan data deskriptif secukupnya jika ia ingin membuat keputusan tentang pengalihan tersebut. Untuk keperluan itu peneliti harus melakukan penelitian kecil untuk memastikan usaha memverifikasi tersebut.

## 3. Teknik Memeriksa Kebergantungan

Dalam penelitian kualitatif, uji ketergantungan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan penelitian di lapangan, tetapi bisa memberikan data. Peneliti seperti ini perlu diuji dependability-nya. Untuk mengecek apakah hasil penelitian ini benar atau tidak, maka peneliti akan selalu mendiskusikannya dengan pembimbing. Hasil yang di konsultasikan antara lain proses penelitian dan taraf kebenaran data serta penafsirannya. Untuk itu peneliti perlu

menyediakan data mentah, hasil analisis data dan hasil sintesis data serta catatan mengenai proses yang digunakan.

#### 4. Kepastian Data (*Confirmability*)

Menguji kepastian (*Confirmability*) berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang ada dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tapi hasilnya ada. Derajat ini dapat dicapai melalui audit atau pemeriksaan yang cermat terhadap seluruh komponen dan proses penelitian serta hasil penelitiannya. Pemeriksaan yang dilakukan oleh pembimbing menyangkut kepastian asal usul data, logika penarikan kesimpulan dari data dan penilaian derajat ketelitian terhadap kegiatan peneliti tentang keabsahan data.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian tentang Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Pesisir Barat, sudah cukup baik / sukses hal ini dilihat dari pembangunan kelembagaan yang mendukung perkembangan pariwisata dimana memfokuskan pada pembangunan kelembagaan pada destinasi pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat. Kelembagaan ini diartikan baik sebagai kebijakan ataupun kegiatan-kegiatan yang mendukung perkembangan pariwisata. Kebijakan mencakup politik pariwisata yang digagas oleh pemerintah seperti kebijakan pemasaran, dukungan terhadap even-even budaya, sertifikasi kompetensi, sumberdaya manusia, produk dan jasa wisata (industri pariwisata). Pengelolaan destinasi wisata bahari pola interaksi antar unsur pengelola dengan destinasi wisata dimana:

1. Interaksi antar pranata kemasyarakatan lokal dengan destinasi pariwisata, berwujud pemberdayaan pranata yang ada di masyarakat.

2. Interaksi antar pemerintah dengan destinasi wisata bahari melalui kebijakan-kebijakan sehingga bermanfaat.
3. Interaksi antar pelaku pariwisata dan destinasi wisata lebih diarahkan pada investasi yang bersifat terbatas dan terkendali.
4. Interaksi antar badan pengelola dengan destinasi wisata yang bersifat profesionalisme dan kemitraan dan badan pengelola terdiri dari masyarakat, pemerintah dan usaha pariwisata. Ketiga komponen dari badan pengelola satu sama lain berfungsi sebagai mitra kerja untuk saling memperkuat, sehingga destinasi pariwisata menjadi berdaya saing.

Pengelolaan destinasi untuk menjamin keberlanjutan isu-isu komodifikasi terkait kualitas produk, sarana dan prasarana, ketersediaan SDM pariwisata. Keberhasilan untuk menghasilkan produk yang berdaya saing adanya kalaborasi, koordinasi, dan saling memperkuat dari para pemangku kepentingan yang ada pada destinasi wisata serta menjalankan peran dan fungsinya masing-masing sedangkan dilihat dari segi:

1. Dari segi komunikasi dalam pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Pariwisata Pesisir Barat sudah dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, yaitu adanya koordinasi antar sektor, pemasaran dilakukan oleh PHRI, ASSITA dan HPI serta promosi dilakukan melalui kegiatan Festival, media massa, maupun promosi yang dilakukan diluar Provinsi Lampung. Pemerintah Pesisir Barat khususnya Dinas pariwisata dan ekonomi Kreatif sudah melakukan koordinasi baik pada instansi terkait, masyarakat, pengusaha, pemerintah Provinsi maupun Pusat.

2. Dari segi sumber daya yaitu sumber daya manusia baik staf maupun pejabat masih sangat kurang baik jumlah maupun keahliannya
  - Tenaga kerja yang ada di Industri Pariwisata (hotel, restoran, travel) belum mempunyai sertifikasi profesi pariwisata
  - Anggaran / sumber dana masih sangat minim yaitu di tahun 2014 Rp 2.131.067.000,- dan tahun 2015 Rp 2.939.842.000,- dan tahun 2016 Rp 2.821.953.000,- sedangkan dana yang dibutuhkan sebesar lebih kurang Rp 5.000.000.000,- setiap tahunnya.
3. Sikap pelaksana yang ada di Kabupaten Pesisir Barat memiliki sikap dan etos kerja yang mendukung kebijakan pariwisata
4. Struktur organisasi sudah cukup memenuhi kebijakan, kegiatan dan program yang ada, tetapi belum semuanya dapat diisi pegawai. Belum ada standar operasional prosedur (SOP) dalam melaksanakan tupoksi sehingga pegawai belum memiliki kinerja yang baik.

Dan dari segi ketercapaian target dan sasaran Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Pesisir Barat dilihat dari anggaran yang mencapai 90% dan sesuai dengan Renstra Dinas pariwisata dan ekonomi Kreatif Pesisir Barat dan interaksi antara pemerintah dan masyarakat serta pengusaha sudah cukup profesionalisme dan sebagai mitra kerja yang saling memperkuat untuk memajukan pariwisata Pesisir Barat.

Sedangkan kendala / faktor-faktor yang menghambat proses implementasi kebijakan antara lain:

1. Belum adanya sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja industri pariwisata
2. Kuranya SDM yang profesional di bidang pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3. Sumber dana yang ada masih sangat minim sekali.
4. Belum adanya standar operasional prosedur (SOP)
5. Infra struktur (jaringa listrik dan jaringa air bersih) yang ada di Pesisir Barat belum memadai

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Kebijakan Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat, dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu diadakan pelatihan di bidang profesi Pariwisata
2. Perlu diadakan sertifikasi kompetensi pada SDM industri pariwisata
3. Perlu peningkatan Pembangunan sarana dan prasarana pendukung pariwisata
4. perlu meningkatkan anggaran sehingga pembangunan lebih baik lagi
5. Dibuat SOP sehingga hasil kerja maksimal

## DAFTAR PUSTAKA

- Damanik, Janianton dan Weber, Helmut F. 2006. *Perencanaan Ekowisata*.  
Jogjakarta. CV. Andi Offset
- Hasan, Iqbal, 2002. *Metodelogi Penelitian dan aplikasinya*. Jakarta: Ghalia  
Indonesia
- Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 2012. *Pengembangan Wisata  
Bahari di Indonesia*. Jakarta. Puslitbang
- Parsons, Wayne. 2014. *Public Policy: pengantar teori dan praktek Analisis  
Kebijakan*: Jakarta . PT. Prenadamedia Group
- Pasalong, harbani. 2007. *teori Administrasi Publik*. Bandung: CV. Alfabeta
- Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV. Alfabeta
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan kasus)*. Jakarta: PT  
Buku Seru
- Sugiono. 2009. *Metode penelitian Kuantitatif dan kualitatif dan RnD*. Bandung.  
Alfabeta

Agustino, Leo.2012. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung. CV. Alfabeta.

Abdul Wahab, Solichin.2008. *Analisis Kebijakan.Dari Formulasi ke Implemenasi Kebijakan Negara* . Jakarta. Bumi Akasara

Erwin Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulystiastuti.2012. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*.Yogyakarta.Gava Media

Edi Suharto. 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung. CV. Alfabeta.

Agustino. 2012. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung. CV. Alfabeta.

Moloeng Lexs. J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. Rahaja Rosdakarya Offset.

WI. Jenksin. 1978. *Publik Analysis*. [https://books google. Co.id/book/policy analysis.htm/g.id=7k15mgEACAAJ](https://books.google.co.id/book/policy-analysis.htm/g.id=7k15mgEACAAJ) & Redin\_esl=y.

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung. *Pariwisata dalam angka tahun 2015*.

Buku neraca satelit Pariwisata provinsi Lampung tahun 2014

Soekadijo RG,2000,*anatomi pariwisata memahami pariwisata sebagai Linkag*. Jakarta : PT Gremedia Pustaka utama



Prof.Hunzieker dan Prof.K.Krapt dalam Muhammad Ilyas. 2009. *Definis Pariwisata*

World Tourism Organization (WTO) Pitana, S 2009 *dalam Pengantar Ilmu Pariwisata*

Http: [www.warta.trevel.com](http://www.warta.trevel.com)

### **Dokumen dan Peraturan Perundang-undangan :**

Undang undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan.

Perda Kabupaten Pesisir Barat Nomor 10 tahun 2016 tentang Kepariwisataan

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Lampung tahun 2011

Rengstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pesisir Barat

Peraturan menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata.

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Pesisir Barat tahun 2015

Undang-undang No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-undang RI nomor 27 tahun 2007. Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Undang-undang Nomor 22 tahun 2012. tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014, Dinas pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pesisir Barat.